

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur keselarasan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berskala nasional. Dalam meningkatkan perekonomian, pemerintah telah berperan aktif dalam mengelola keuangan daerah secara merata. Adanya pengelolaan keuangan dari pemerintah pada suatu daerah guna untuk mencapai tujuan perekonomian nasional serta untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Suwandi (2015), desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur kegiatan di daerah tersebut berdasarkan asas otonom. Dana alokasi umum sebagai salah satu elemen desentralisasi fiskal menjadi elemen penting bagi pemerintah daerah untuk menutup pembiayaan daerah implikasinya.

Dana alokasi umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana alokasi umum yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut Sudarsana (2013), besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari APBN.

Dana alokasi umum bertujuan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah, karena dana alokasi umum merupakan transfer pusat ke daerah otonom yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh daerah. Adanya dana alokasi umum ini adalah untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah yang kurang mampu dari segi pembiayaan urusannya akan memperoleh alokasi dana alokasi umum yang relatif besar.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara luas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Selain itu, otonomi daerah berguna untuk memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri meskipun masih terikat dengan negara. Otonomi daerah juga mampu

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menganalisis potensi apa yang dapat menyebabkan meningkatkan suatu perekonomian daerah. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disisi lain, kebijakan yang selaras akan kondisi disuatu daerah, dapat memicu adanya potensi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Serta, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan dengan perkembangan dari suatu kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan barang serta jasa yang telah diproduksi di dalam masyarakat akan bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat (Sularso, 2011 dalam Wilujeng, 2014). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan kebijakan yang baik dan tepat sasaran dari pemerintah daerah. Penetapan kebijakan memerlukan informasi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah baik tingkat efisiensi maupun karakteristik siklus bisnis nya. Dengan demikian, dukungan kebijakan bagi sektor-sektor yang membutuhkan akan dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah periode mendatang.

Todaro (2016) dalam Chandra (2015) pertumbuhan ekonomi dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan pengelolaan kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah. Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Adapun manfaat dari pertumbuhan ekonomi yaitu untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional serta pendapatan perkapitanya dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkatnya pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.

Menurut Yuniarti (2008), peningkatan pendapatan perkapita akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak seperti pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, bea balik nama dan retribusi seperti retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi ijin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi IMB, retribusi APAR yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan

daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah.

Menurut Pratiwi (2018), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2009: 121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998).

Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011). Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD salah satunya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

Selain pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan juga unsur yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu belanja modal. Menurut Tanjung (2017), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk menambah aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina dan Rasdianto, 2013:46), yang secara langsung membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat dikatakan membawa dampak positif aset tetap berwujud itu akan berguna untuk menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik maupun pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan belanja modal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan belanja modal akan menghasilkan kinerja keuangan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016), dengan waktu, obyek, dan variabel yang berbeda karena ada penambahan variabel lain yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah. Objek dalam penelitian ini seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengungkap penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan informasi, wawasan, dan referensi dilingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana cara menghitung dan menganalisis laporan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola keuangan daerah.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

c. Bagi pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat dapat membantu pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam memberikan masukan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; sumber data; pengukuran variabel; metode pengumpulan data; dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pengolahan data dengan alat analisis yang diperlukan, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun bagi penelitian selanjutnya.